

PERAN PEMERINTAH, KAPITALIS, DAN NETTERS DALAM MENGONTROL MEDIA (ANALISIS TERHADAP STUDI MEDIA DI LIPI)

THE ROLE OF GOVERNMENT, CAPITALISTS, AND NETTERS IN CONTROLLING MEDIA (ANALYSIS OF LIPI'S MEDIA RESEARCH)

Nina Widyawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
widyawati11@yahoo.com

Abstrak

Studi media di LIPI berjalan seiring dengan isu-isu yang hangat di jamannya. Dimulai tahun 1976 ketika pemerintah Orde Baru ingin menggunakan televisi sebagai alat pembangunan. Pemerintah memutuskan untuk memiliki Sistem Komunikasi Satelit Domestik agar siaran televisi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akses televisi yang luas dirancang untuk mempertahankan *status quo* dengan cara menyiarkan keberhasilan pemerintah. Kenyataannya televisi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, sejak akhir pemerintahan Orde Baru sampai awal runtuhnya Orde Baru, LIPI banyak melakukan studi *media effect* menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah Orde Baru runtuh, sistem pemerintahan juga berubah dari sentralistis menjadi desentralistis. Media juga tumbuh menjadi institusi yang lebih demokratis. Pada saat yang sama, kapitalisasi media berkembang pesat. Industri media dikuasai oleh kapitalis dan hal ini kemudian berpengaruh kepada kebijakan dalam menentukan konten. Berkembanglah studi-studi kritis seperti ekonomi politik media dan analisis wacana kritis. Ketika TIK berkembang, peran kapitalis dalam mengontrol konten mulai digeser oleh *netters*. Pada era ini, LIPI melakukan studi tentang masyarakat jaringan. Dengan demikian, pola perkembangan studi media di LIPI tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Amerika dan Eropa. Perubahan suatu rezim berpengaruh terhadap peran media yang pada akhirnya mempengaruhi tema studi. Bedanya, studi di LIPI lebih lambat antara 10-20 tahun dari perkembangan studi di Amerika dan Eropa.

Kata kunci: studi media, kontrol, pemerintah, kapitalis, *netters*

Abstract

Research about Media at LIPI goes hand in hand with the important issues of the era. Started in 1976 when the New Order Government wanted to use television for development tools. The government built Sistem Komunikasi Satelit Domestik (Domestic Satellite Communications System) for television to be able to be accessed by all Indonesian. On the one hand, television access is designed to maintain the status quo by broadcasting the success of the government, but on the other hand, there are negative impact. Therefore, started from the end of the New Order Government until the beginning of the fall, LIPI conducted media effect studies with quantitative approach. The fall of New Order has changed the system from centralized to decentralized, consequently, the media has also grown into a more democratic one. At that time, capitalization of media industry begins to flourish, as an effect the media industry is exploited by the capitalist which able to influence the policy by determining the content. This era, media research at LIPI employs critical approach such as the political economy of media and critical discourse analysis. When ICT develops the role of capitalist in controlling content, began to be shifted by netters, LIPI conducts studies about network society. Thus, the pattern of media research in Indonesia is not much different from that occurred in America and Europe. The change of a regime influences the role of the media that ultimately affects the theme of the study. The difference of media study in LIPI is 10 to 20 years slower in comparison with similar study in America and Europe.

Keywords: media research, government, controlled, capitalists, *netters*

Pendahuluan

Dalam penelitian sosial, teori diperlukan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Teori digunakan bagai sebuah peta dalam dunia sosial

untuk melihat kompleksitas dunia. Teori juga digunakan untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi (Neuman, 2006: 50), sedangkan realitas dalam ilmu sosial merupakan konstruksi sosial yang memiliki dimensi historis terkait

dengan konteks sosialnya. Oleh karena itu, perkembangan ilmu sosial mengikuti tradisi tertentu yang terkait dengan konteks historis (Hidayat, 2008: 156). Ilmu komunikasi merupakan salah satu disiplin dalam ilmu sosial yang perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari relasi tersebut.

Konteks sosial di antaranya adalah adanya perang, situasi kerusuhan, dan pergantian suatu rezim. Ilmu komunikasi merupakan salah satu disiplin ilmu yang awal perkembangannya banyak diwarnai oleh konteks sosial terkait dengan perang. Salah satu contoh adalah Teori Hovland tentang persuasi dan perubahan sikap lahir dalam konteks perang, yaitu adanya keinginan untuk mempelajari propaganda Nazi pada Perang Dunia II. Penelitian Hovland menarik karena dananya berasal dari pemerintah Amerika. Pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen. Dalam konteks seperti inilah penelitian sosial kuantitatif disebut sebagai bebas nilai atau *value free* (Rogers, 1997: 356-357).

Konteks sosial lain yang berpengaruh dalam perkembangan disiplin ilmu komunikasi, terutama komunikasi massa, adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi berakibat pada globalisasi. Perkembangan teknologi juga membuat media menjadi konvergen. Hal tersebut membuat ilmu komunikasi mengalami perkembangan pesat dan membuat ilmu komunikasi menjadi multidisiplin. Untuk menganalisis fenomena sosial terkait dengan komunikasi massa perlu sumbangan disiplin lain. Pada awal perkembangannya, pengaruh disiplin psikologi sangat kuat. Pada perkembangan selanjutnya, berbagai disiplin ilmu ikut mempengaruhi, di antaranya adalah sosiologi, politik, bahasa, dan sastra.

Konteks sosial juga membuat ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi tumbuh menjadi *muliti-paradigm science*. Paradigma Struktural Fungsional mencapai kejayaannya pada tahun 1970-1980an. Pada saat itu, ilmu komunikasi digunakan sebagai alat pembangunan. Era ini merupakan era kejayaan studi kuantitatif yang memiliki sifat bebas nilai. Kegagalan paradigma struktural fungsional sebagai alat pembangunan membuat studi-studi dengan paradigma kritis berkembang. Namun demikian, pascakegagalan sistem sosialis di Eropa Timur, paradigma kritis mulai menurun popularitasnya. Pemikiran kritis dimulai ketika pengaruh kekuatan sosial baru

lahir pascarevolusi industri. Pada saat itu terjadi relasi baru dalam konteks kekuasaan, di antaranya adalah kekuasaan kapitalis. Kondisi ini membuat ilmu sosial merasa perlu adanya *value judgement*. Maka tumbuhlah ilmu sosial paradigma kritis yang diperlukan untuk penyadaran dan pemihakan pada kaum tertindas.

Perkembangan ilmu sosial kritis dan konstruktivis diikuti oleh berkembang pesatnya berbagai varian dalam metode penelitian kualitatif. Teknologi juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Awalnya, teknologi diimpikan sebagai entitas yang netral dan obyektif. Kenyataannya teknologi tidak bisa dipisahkan dalam relasi sosial tersebut (Hidayat, 2008: 158-162). Oleh karena itu, studi-studi media terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi baik yang menggunakan perspektif determinisme teknologi atau yang tidak mempercayai adanya determinisme teknologi berkembang sangat pesat.

Tulisan ini merupakan refleksi dari rangkaian perjalanan penelitian media yang pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian media diawali oleh penelitian tentang dampak Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD Palapa) yang dilakukan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI). Setelah reorganisasi LIPI pada tahun 2000, studi media dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan yang disingkat menjadi PMB (Tahun 2014 diubah menjadi P2KK). Penelitian-penelitian tersebut dianalisis kembali dan diletakkan dalam konteks sosial yang mempengaruhi dilakukannya studi, yaitu:

- (1) Perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini adalah sistem politik yang dianut Negara tempat media tersebut berada. Penelitian yang dilakukan pada era Orde Baru dikaitkan dengan konteks politik sentralistik yang mengacu pada sistem pers (media) yang memiliki ciri-ciri mirip dengan sistem pers otoritarian. Sementara itu, konteks sosial yang digunakan pada penelitian-penelitian pasca Orde Baru adalah sistem pers yang memiliki ciri mirip dengan sistem pers libertarian. Konteks sosial pasca Orde Baru dikaitkan dengan demokratisasi pers terjadi setelah adanya peristiwa penting yaitu deregulasi pers di era pemerintahan Habibie dengan dicabutnya

Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang ketentuan Surat Ijin Usaha Penerbitan sebagai dasar hukum pembredelan. Kebebasan pers dan kapitalisasi media memunculkan isu baru yaitu adanya pers partisan, konglomerasi media, dan homogenisasi isi media. Pada era ini terjadilah pergeseran dari *state regulation* menjadi *market regulation* (Hidayat, dkk., 2000: 451-452);

- (2) Pengaruh perkembangan ilmu di Amerika dan Eropa terhadap perkembangan studi media di LIPI;
- (3) Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan fenomena sosial akibat teknologi berpengaruh terhadap pilihan tema studi.

Tulisan ini berasal dari penelitian dengan menggunakan *desk research*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu hasil penelitian Leknas dan P2KK-LIPI dalam bidang komunikasi, khususnya media. Data yang dikumpulkan adalah hasil penelitian media mulai tahun 1976 sampai 2017. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap peneliti.

Studi Media di LIPI dalam Konteks Historis dan Perkembangan Teori

• Cikal Bakal

Penelitian media di LIPI dimulai ketika pemerintah Orde Baru membuat keputusan penting, yaitu memiliki alat komunikasi baru yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Peluncuran generasi pertama SKSD Palapa dilakukan pada 8 Juni 1976. Dengan adanya satelit yang bisa menjangkau seluruh wilayah tanah air, maka televisi akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat jika jaringan satelit palapa menjangkau wilayahnya. Lokasi penelitian di wilayah perdesaan Kalimantan Barat, Bali, Aceh, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak bisa membayangkan apa itu teknologi satelit¹.

Penelitian dampak SKSD Palapa dilengkapi dengan analisis mengenai konten Televisi Republik Indonesia (TVRI). Alfian, koordinator tim peneliti mengungkapkan bahwa salah satu hal yang banyak mendapat perhatian adalah efek

dari siaran iklan TVRI. Siaran iklan bisa meningkatkan minat konsumsi masyarakat. Alfian juga mengatakan bahwa sifat konsumtif tidak hanya diakibatkan oleh iklan saja tetapi seluruh acara televisi karena seluruh isi televisi merupakan promosi gaya hidup. Analisis tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa media massa dapat meningkatkan *the raising of expectations* di masyarakat. Di lain pihak, jika keinginan tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menjadi *the raising of frustration* (Armando, 2011: 84-85). Dengan demikian, cikal bakal penelitian media di LIPI adalah Dampak Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa yang dilakukan pada tahun 1976 oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI) bekerjasama dengan *East-West Center* sebagai penyandang dana.

Salah satu tujuan diluncurkannya SKSD Palapa adalah menyebarkan kebijakan pemerintah melalui televisi. Diharapkan televisi membuka akses informasi sehingga konten yang lebih banyak bermuatan kebijakan pemerintah Orde Baru bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia (Alfian *et.al.*, 1981 dalam Muchtar, 1996:2). Lebih lanjut, Alfian mengatakan bahwa tujuan penyiaran adalah sebagai berikut.

- (a) Untuk meningkatkan kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa;
- (b) Untuk mempromosikan pembangunan nasional;
- (c) Untuk menjaga kestabilan politik.

Cara berpikir pemerintah Orde Baru adalah asumsi bahwa media *powerful*. Teori-teori komunikasi masa yang mengatakan bahwa pengaruh media *powerful* berkembang di Amerika pada tahun 1930-an. Ketika itu, di Eropa terjadi sebuah gerakan politik yang menggunakan media massa untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu kasus yang paling banyak dijadikan contoh dalam berbagai referensi adalah propaganda menggunakan kekuatan teknologi media massa seperti *motion picture* dan radio oleh NAZI. Melalui teknologi media elit politik dengan mudah memanipulasi sikap dan kepercayaan masyarakat. Media massa mengantar pemimpin totalitarian, seperti Hitler, Stalin, dan Mussolini, meningkat kekuasaannya. Perkembangan teori komunikasi massa pada era ini disebut sebagai awal dari era masyarakat massa (*mass society*). Pada masyarakat massa pengaruh media dianggap *powerful* dan rezim totalitarian mengontrol media untuk mempromosikan ideologi

¹Wawancara dengan RS salah seorang anggota tim peneliti, 27 Oktober 2017.

(Baran dan Davis, 2000: 12-13). Kerangka teori yang digunakan oleh rezim totalitarian berdasarkan pada pemikiran bahwa pengaruh media *powerful* adalah teori *magic bullet*. Teori ini disebut juga dengan teori jarum suntik, artinya sekali pesan media dilontarkan maka pengaruhnya sangat cepat dan menyeluruh.

- **Media Effect**

Di akhir era pemerintahan Orde Baru, yaitu tahun 1995-1998, LIPI melakukan studi tentang “Dampak Media Transnasional terhadap Masyarakat Indonesia”. Setelah penelitian dampak SKSD Palapa pada tahun 1976, penelitian media baru dilakukan pada tahun 1995. Peluncuran SKSD Palapa yang semula digagas untuk menyiarkan program pemerintah melalui televisi ternyata tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif. Di akhir kekuasaan pemerintah Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, kepemilikan televisi angkanya cukup tinggi. Pemerintah juga menyediakan televisi yang bisa diakses publik yang ditempatkan di kelurahan. Dengan demikian, *exposure* terhadap televisi cukup tinggi. Pada saat itu konten hiburan, yaitu film serial televisi, pada umumnya berasal Negara-negara Barat, terutama Amerika. Era ini merupakan era kejayaan konten asing di televisi swasta Indonesia.

Fokus penelitian tiap tahunnya berbeda. Judul penelitian tahun 1995 adalah “Pengaruh Film Asing di Televisi terhadap Orang Muda”. Penelitian dilakukan di kota Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang dengan responden remaja usia 15-24 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (47,5%) merupakan penonton berat atau *heavy viewers* yang menonton televisi diatas 3 jam per hari. Mayoritas responden (54%) mengalokasi waktu untuk menonton film asing diatas 2 jam per hari. Fakta empiris menunjukkan bahwa film asing asal Amerika seperti *Renegade*, *Melrose Place*, *Beverly Hills 90210*, dan *MacGiver* paling banyak ditonton (Muchtart, 1995: 44-47).

Penelitian tahun 1996 berjudul ‘Dampak Media Transnasional terhadap Masyarakat Indonesia: Pengaruh Film Asing di Televisi terhadap Gaya Hidup’. Lokasi penelitian adalah Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Sama seperti penelitian tahun 1995, responden penelitian adalah remaja berusia 15-24 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa kota berpengaruh

terhadap penilaian tentang pergaulan yang dilihat di film televisi. Responden yang mengatakan bahwa pergaulan tokoh film asing di televisi kurang baik paling banyak berasal dari Ujung Pandang. Angka ini disusul oleh Surabaya, kemudian Medan. Responden yang menganggap cara bergaul tokoh kurang baik cukup banyak yaitu 50%. Walaupun 50% sisanya tidak menganggap pergaulan tokoh tidak buruk, tetapi responden yang ingin meniru pergaulan tokoh hanya 29,7%. Tokoh film yang menjadi idola umumnya bintang Hollywood. Alasan responden menyukai tokoh adalah cara berpikirnya rasional. Penilaian tersebut diberikan oleh 71% responden. Kekaguman tersebut membuat responden ingin memiliki karakter seperti tokoh. Temuan tahun 1996 sudah menunjukkan kecenderungan masyarakat yang diteliti menyukai makanan asing. Sebanyak 34% responden lebih menyukai makanan asing, 32% lebih menyukai makanan Indonesia, dan 34% responden mengatakan bahwa mereka menyukai baik makanan asing maupun makanan Indonesia (Muchtart, 1996: 48-65).

Judul penelitian tahun 1997 adalah “Dampak Media Transnasional terhadap Masyarakat Indonesia: Pengaruh Film Asing di Televisi terhadap Integrasi Nasional”. Peluncuran SKSD Palapa oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mempersatukan Nusantara, sesuai dengan namanya. Dengan mengetahui keragaman atribut sosial budaya di seluruh Nusantara, diharapkan dapat membantu menguatkan identitas kebangsaan (*sense of unity*). Di lain pihak, diluncurkannya SKSD Palapa membuat sentuhan terhadap globalisasi semakin besar. Komunikasi yang dilakukan melewati batas negara dan batas budaya. Maraknya konten asing saat itu dikhawatirkan berpotensi mengganggu integrasi nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan penggambaran film televisi tentang persahabatan antarsuku, agama, dan status sosial ekonomi. Kecintaan responden pada produk budaya Indonesia, yaitu musik dan tarian, masih tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas responden kurang setuju dengan gaya hidup hedonis sebagaimana digambarkan dalam film televisi (Widyawati, 1997: 54-61). Penelitian ini dilakukan di Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Responden penelitian adalah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Judul penelitian tahun terakhir (1998) adalah “Dampak Media Transnasional terhadap

Masyarakat Indonesia: Pengaruh Film Asing di Televisi terhadap Kenakalan Remaja”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah banyaknya kekerasan pada remaja. Berita mengenai tawuran pelajar yang berujung pada kematian menghiasi berbagai surat kabar. Kadang penyebab tawuran hanya hal sepele, yaitu saling mengejek. Beberapa kelompok masyarakat menuduh televisi sebagai penyebabnya. Konten televisi (termasuk film asing) pada era tersebut memang sarat dengan kekerasan.

Tuduhan bahwa televisi sebagai salah satu penyebab tingkah laku kekerasan bukanlah hal yang baru dalam penelitian komunikasi, juga bukan hanya di Indonesia. Di Amerika tuduhan yang sama juga terjadi. Hal itu membuat seorang akademisi Amerika, yaitu Gerbner, melakukan serangkaian studi mengenai media dan agresivitas untuk menjawab pertanyaan peran media dalam masyarakat. Hasilnya adalah teori budaya yang sifatnya hibrid antara mikroskopis dan makroskopis yang disebut dengan teori kultivasi. Televisi mengkultivasi atau menciptakan *world view* yang mungkin kurang akurat tetapi bisa menjadi realitas karena dipercaya.

Studi Gerbner menunjukkan adanya korelasi antara banyaknya menonton televisi dengan prevalensi kekerasan. Gerbner pernah menggunakan kontrol variabel pendidikan, jenis kelamin, umur, dan ras. Pada studi yang berbeda, digunakan kontrol variabel lain, yaitu jenis kelamin, umur, membaca koran, pendidikan ayah, dan IQ. Kontrol variabel lain yang juga dicoba adalah umur, Status Ekonomi dan Sosial (SES), *achievement*, dan pengalaman sebagai korban. Hasilnya sama, yaitu terdapat bias antara gambaran di televisi dengan kenyataan yang akan terjadi. Gambaran di televisi berlebihan. Media membentuk apa yang kita pikirkan tentang hakikat dunia. Media mempengaruhi pembentukan realitas yang mengacu pada orientasi individu tentang dunia dan bias pengalaman masa lalu dan pengalaman aktual. Gerbner juga mengembangkan konsep *mainstreaming* dan *resonance*. *Mainstreaming* adalah kesamaan pandangan kelompok penonton berat. *Resonance* adalah kondisi ketika penonton berat yang memiliki pengalaman yang sama dengan media akan kuat pengaruhnya (Baran dan Davis, 2000: 309-318).

Hasil penelitian tahun LIPI tahun 1997 menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengaruhnya paling besar. Lingkungan dalam hal ini adalah

lingkungan tempat tinggal responden yang pernah terjadi konflik sosial. Lingkungan sosial merupakan pengalaman aktual dan pengalaman masa lalu. Temuan lain menunjukkan bahwa film asing tidak berpengaruh pada jenis-jenis kenakalan yang terjadi di sekolah. Kenakalan di sekolah adalah jenis kenakalan yang tingkat agresivitasnya rendah. Film asing televisi juga tidak berpengaruh terhadap kekerasan yang agresivitasnya tinggi. Namun, film asing berpengaruh pada perubahan perilaku kenakalan terhadap teman, kenakalan di luar sekolah, dan kenakalan terhadap keluarga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih mudah terpengaruh dibanding dengan responden perempuan (Widyawati, 1998: 60-84).

Krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 1997 dan diikuti oleh jatuhnya rezim Orde Baru. Kondisi ini membuat konten televisi swasta di Indonesia berubah. Menguatnya mata uang dollar Amerika dan terdepresiasi rupiah membuat konten televisi swasta bergeser pada konten lokal. Namun sayang, konten lokal yang berkembang kurang sejalan dengan cita-cita Orde Baru ketika meluncurkan SKSD Palapa yaitu untuk menyiarkan keberhasilan pembangunan. Konten lokal televisi swasta pada awal kejatuhan Orde Baru banyak yang tidak mendidik dan irasional, yaitu pornografi, mistik, dan kekerasan. Minat untuk menonton tayangan tersebut cukup tinggi. Berangkat dari keprihatinan melihat situasi tersebut, maka LIPI kembali melakukan penelitian *media effect* yang fokusnya berbeda dengan penelitian tahun 1995-1998. Penelitian kali ini bertujuan untuk melihat dampak konten lokal. Judul penelitian tahun 2005 adalah “Persepsi Masyarakat terhadap Tayangan Pornografi, Kekerasan, dan Mistik di Televisi” dengan pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif. Penelitian tahun 2006 berjudul “Dampak Tayangan Pornografi, Kekerasan, dan Mistik di Televisi”.

Hasil penelitian tahun 2005 menunjukkan bahwa penetrasi televisi sangat besar, sebanyak 90% responden adalah penonton televisi. Penetrasi televisi paling besar di antara media massa lainnya seperti koran, radio, dan majalah. Akses internet kala itu masih terbatas di perkotaan. Hasil penelitian tahun 2005 menunjukkan bahwa:

- (a) Terjadi proses sosialisasi pornografi, kekerasan, dan mistik;

- (b) Persepsi atas tayangan pornografi, kekerasan, dan mistik berkaitan dengan latar belakang budaya pemirsa;
- (c) Terjadi proses penumpukan kepekaan akibat terpaan yang berlebihan;
- (d) Terjadi proses imitasi. Sebagian kecil responden merupakan *dominant reading* terhadap konten pornografi;
- (e) Terjadi proses resistensi. Remaja kelompok elit cenderung sebagai *oppositional reading* terhadap konten kekerasan, mistik, dan pornografi; sedangkan responden non-elit cenderung menjadi *dominant reading*. Responden usia tua cenderung menjadi *negotiated reading*;
- (f) Terjadi perubahan perilaku tetapi angkanya kecil;
- (g) Terjadi dominasi kekuatan media (Hanim, 2005: 175-184).

Hasil penelitian 2006 menunjukkan bahwa pajanan terhadap tayangan pornografi dan kekerasan cukup tinggi. Untuk konten mistik responden di kota Palembang eksposurnya cukup tinggi yaitu hampir 50%. Responden yang tingkat keterpaparan terhadap konten mistik tinggi cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya supranatural dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tingkat keterpaparan responden di Semarang terhadap tayangan mistik angkanya rendah yaitu 26% (Hanim, 2006: 249-256).

Hasil penelitian tahun 2005 dan 2006, menjadi dasar peneliti LIPI untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Media Literacy Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Negatif Media Televisi*” yang dilakukan pada tahun 2007. Tujuan penelitian adalah melihat variabel apa saja yang membuat seorang individu memiliki literasi media. Media literasi sudah lama dikampanyekan tetapi belum banyak pengaruhnya. Masyarakat, khususnya remaja, belum menyadari pentingnya media literasi. Latar belakang aktivitas khalayak dalam bergaul di ruang publik berpengaruh terhadap literasi media. Semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin tinggi literasinya. Beberapa responden sudah memiliki kesadaran media literasi dan mengetahui cara kerja media. Keterampilan literasi media mengurangi dampak negatif. Media literasi bukan melarang akses terhadap media, tetapi mendidik masyarakat menjadi *audience* yang aktif dan juga kritis. Penelitian ini dilakukan di Medan dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi media di Yogyakarta lebih baik daripada Medan.

Keterlibatan berbagai institusi seperti Masyarakat Peduli Media (MPM), Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), serta Badan Informasi Daerah mampu meningkatkan literasi media pada masyarakat Yogyakarta (Hanim, 2007: 140 -142).

Metodologi yang digunakan untuk penelitian *media effect* adalah survei. Penggunaan pendekatan kuantitatif, yaitu survei dan eksperimen, dalam penelitian komunikasi dikembangkan oleh Lazarsfeld di *Bureau for Applied Social Research, Columbia University*. Lazarsfeld banyak melakukan penelitian pengaruh media pada masyarakat. Salah satu penelitiannya adalah pengaruh propaganda politik. Ternyata hasilnya media tidak *powerful* seperti yang dibayangkan semula. Terdapat manusia yang resisten terhadap pengaruh media. Penelitian Lazarsfeld yang menggunakan metode kuantitatif merupakan awal lahirnya perspektif *limited effects*. Beberapa teori disebut *administrative theories* karena digunakan untuk mengambil kebijakan praktis (Baran dan Davis, 2000: 122-126).

Di era *mass society* media merupakan simbol dari kehidupan kota. Media merepresentasikan baik dan buruknya kehidupan modern. Pada era ini, kritik terhadap media cukup tajam. Media dianggap bertanggung jawab atas menurunnya selera masyarakat. Dalam bidang politik, media juga dianggap sebagai penebar kerusuhan karena mengubah nilai-nilai budaya yang disebabkan lahirnya *penny press*. *Penny press* adalah surat kabar yang dijual dengan harga sangat rendah (satu *penny*). Surat kabar memperoleh keuntungan dari penjualan (Baran dan Davis, 2000: 12-13). Begitulah cara kerja media memperoleh keuntungan. Untuk surat kabar, produsen menjual surat kabar kepada pembaca, kemudian produsen juga menjual pembaca kepada pemasang iklan (Smythe dalam Barret, 2000: 222-228).

Era *limited affect* merupakan periode akhir dari era *mass society*. Perspektif *limited effect* memandang media memperkuat kecenderungan sosial yang ada dan memperkuat *status quo*. Awalnya perspektif *limited effect* kurang diterima, terutama di saat Perang Dunia. Masyarakat waktu itu masih mempercayai bahwa efek dari media *powerful*. *Limited effect* baru diterima oleh kalangan akademisi pasca Perang Dunia II. Studi Lazarsfeld dan Elihu Katz yang diterbitkan dalam buku *Personal*

Influence berpengaruh terhadap diterimanya paradigma *limited effect* di kalangan akademisi. Buku ini menjelaskan bagaimana manusia menggunakan media. Efek media memang tidak langsung kepada *audience* tetapi terdapat pihak yang mengantari proses penerimaan pesan komunikasi. Pihak yang mengantari adalah tokoh masyarakat yang oleh Lazarsfeld diberi nama *Opinion Leader*. Cara kerja media seperti ini disebut dengan *two step flow theory* (Baran dan Davis, 2000: 126-130).

Pandangan bahwa pengaruh media tidak langsung diperkuat oleh studi Hovland. Pada tahun 1953 Hovland melakukan studi tentang komunikasi dan persuasi serta pengaruhnya terhadap perubahan sikap. Menurut Hovland, kredibilitas komunikator (*trustworthiness, expertness*) sangat menentukan keberhasilan komunikasi dan mediasi. Setelah diterimanya paradigma *limited effect*, studi tentang persuasi dan pengaruh media banyak dilakukan sekitar tahun 1950-1990an. Studi yang dilakukan Dewey juga mengukuhkan paradigma *limited effect* melalui penolakan Dewey terhadap teori *magic bullet* atau teori jarum suntik. Dasar penolakan Dewey adalah manusia itu rasional (Baran dan Davis, 2000: 77 dan 132-136).

Pada era *limited effect* studi yang banyak dilakukan adalah kekerasan dan anak. Media dianggap berpengaruh buruk terhadap anak-anak. Terdapat korelasi antara potret kekerasan di televisi dan perilaku kekerasan. Salah satu studi tentang kekerasan yang banyak mendapat perhatian adalah studi Gerbner. Menurut Gerbner (dalam Baran dan Davis, 2000: 315-316) penonton berat atau *heavy viewers* lebih agresif dibanding dengan *light viewer*. Studi mengenai pengaruh media yang dilakukan oleh LIPI dengan judul Dampak Media Transnasional Terhadap Masyarakat Indonesia merupakan bentuk dari studi pengaruh media (*media effect*). Ketika penelitian tersebut dilakukan, studi tersebut menggunakan teori yang masih dianggap *state of the art* dari studi *media effect*.

Studi *media effect* di LIPI juga menggunakan teori tentang pembentukan realitas sosial yang dikemukakan oleh Adoni dan Mane. Realitas sosial dibagi dalam 3 bentuk, yaitu:

- (a) Realitas sosial objektif, yaitu gejala-gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta;

- (b) Realitas sosial simbolis, yaitu bentuk-bentuk simbolis dari realitas sosial objektif yang biasanya diketahui dalam bentuk karya seni. Di sini realitas yang sudah dibentuk sedemikian rupa;
- (c) Realitas sosial subjektif, yaitu realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik (Adoni dan Mane dalam Muchtar, 1996: 7).

Salah satu studi mengenai *media effect* yang dilakukan oleh LIPI yaitu “Dampak Tayangan Pornografi, Kekerasan, dan Mistik di Televisi” dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Kegagalan studi-studi kuantitatif dalam memetakan dampak pembangunan memunculkan sikap skeptis di beberapa kalangan. Pada akademisi umumnya di Eropa mengembangkan pendekatan baru yang memiliki asumsi *audience* aktif. Pendekatan yang dikembangkan berasal dari paradigma kritis. Salah satu tokoh yang mengembangkan adalah Stuart Hall. Dalam studinya Hall mengembangkan 3 (tiga) tipe *audience*, yaitu sebagai berikut.

- (a) *Preferred reading*. Disebut juga dengan *dominant reading*. Konten yang diproduksi mengandung nilai-nilai tertentu untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. *Audience* menginterpretasikan konten tersebut sesuai dengan yang diinginkan produser;
- (b) *Negotiated reading*. *Audience* menginterpretasikan konten secara berbeda dengan *dominant reading*. Terjadi negosiasi antara nilai yang ditawarkan media dengan nilai yang diyakini *audience*;
- (c) *Oppositional reading*. *Audience* melakukan interpretasi berlawanan dengan *dominant reading* (Hall dalam Daring, 1993: 90-103).

• Ekonomi Politik

Ekonomi politik media merupakan subdisiplin dalam ilmu komunikasi yang mempelajari produksi, distribusi dan konsumsi media (Mosco, 2009: 2). Setelah Orde Baru runtuh, demokrasi media pada umumnya, usaha penerbitan pada khususnya, mulai terbuka. Deregulasi di bidang usaha penerbitan membuat pertumbuhan penerbitan pers nasional sangat pesat. Pada masa Orde Baru tercatat jumlah SIUPP hanya 321 buah. Pada bulan April 1999 telah terbit SIUPP sebanyak 852 buah. Kemudian pada bulan Juli 1999 jumlah penerbitan pers menjadi 1.427 buah (Widyawati,

2000: 81). Pesatnya pertumbuhan penerbitan pers di Indonesia disebabkan oleh adanya penyertaan modal yang besar. Pada era ini pers tumbuh sebagai industri komersial. Sifat komersial ini mendorong industri pers melakukan diversifikasi usaha. Akibatnya adalah menurunnya industri pers tunggal menuju bentuk industri pers jaringan. Kondisi ini memunculkan 4 kerajaan pers berjaringan, yaitu:

- (a) Kompas - Gramedia Group;
- (b) Sinar Kasih Group;
- (c) Tempo-Grafiti/ Jawa Pos Group; dan
- (d) Media Indonesia/ Surya Persindo Group (Hill, dalam Widyawati, 2000: 7).

Terjadi pembagian wilayah demografis dalam penerbitan pers. Wilayah Indonesia bagian barat dikuasai oleh Kompas-Gramedia Group, sedangkan wilayah Indonesia Bagian Timur dikuasai oleh Tempo-Grafiti/ Jawa Pos Group.

Pada saat yang hampir bersamaan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disahkan. Melalui Undang-undang ini beberapa kewenangan pemerintah pusat berpindah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Legislatif di daerah pada era Orde Baru hanyalah mitra bagi pimpinan daerah, kini peran DPRD meningkat. Berbagai isu terkait politik lokal seperti politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan rendahnya kualitas DPRD mulai mencuat. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen penyeimbang, yaitu pers daerah. Pertanyaannya adalah, apakah pers daerah bisa dijamin independensinya? Dalam perusahaan pers, berbagai kekuatan sosial seringkali berpengaruh dalam proses produksi teks. Intervensi pemilik modal terhadap proses produksi seringkali terjadi (Mosco, 2009: 24). Masalah lainnya adalah apakah informasi yang diberikan pers di daerah bersifat lokal? Selama ini pers daerah lebih banyak memuat berita nasional, termasuk politik nasional. Beberapa pers daerah merupakan surat kabar nasional yang terbit di daerah. Bentuk industri pers seperti ini disebut dengan surat kabar berjaringan (*chain newspaper*). Pada surat kabar berjaringan, koordinasi informasi berada pada level nasional. Iklan juga didapat dari group perusahaan induknya. Situasi ini membuat LIPI ikut berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya melalui penelitian "Pers Daerah Menyongsong Otonomi dan Desentralisasi" yang dilaksanakan pada tahun 2000.

Penelitian ini melihat industri surat kabar dari sisi *production approach* yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Hasilnya adalah konglomerasi media tidak hanya dilakukan oleh surat kabar nasional. Surat kabar regional juga melakukan konglomerasi media. Di beberapa daerah muncul pers daerah (*community newspaper*). Akan tetapi, pers daerah yang berbentuk surat kabar tunggal sulit bertahan berhadapan dengan pers daerah yang merupakan bagian dari industri surat kabar berjaringan. Jaringan awal pers daerah berupa suplemen tetapi kemudian tumbuh menjadi surat kabar tersendiri. Surat kabar jaringan bisa bertahan karena biaya produksinya lebih rendah. Surat kabar atau pers daerah berjaringan umumnya mendapat subsidi dalam bentuk berita dari perusahaan induknya. Beberapa perusahaan induk memiliki kantor berita sendiri seperti *Jawa Post News Network* (JPNN).

Alasan kenapa pers daerah sulit tumbuh di antaranya adalah hambatan iklan karena 70% uang beredar di Jakarta. Kebijakan pemasangan iklan biasanya dilakukan oleh perusahaan induk. Sebenarnya pers daerah bisa berkembang kalau ada *local empowerment*. Salah satu bentuknya adalah mengangkat isu daerah. Subsidi berita dari perusahaan induk membuat isi pers daerah seringkali seragam. Akibatnya adalah adanya *monopoly of news*. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk kontrol sosial karena tidak ada diferensiasi opini yang berakibat pada kurang berkembangnya iklim demokrasi (Widyawati, 2000: 84-93).

Dalam pandangan ekonomi politik, institusi media memiliki peran sentral dalam masyarakat. Analisis dilakukan terhadap institusi media karena produksi konten dilakukan oleh institusi tersebut. Ekonomi politik media merupakan studi yang sifatnya *macroscopic*, yaitu teori struktural, yang melihat bagaimana elit menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengontrol dan mengeksploitasi media dengan cara hegemoni. Proses hegemoni dilakukan melalui kontrol terhadap kesadaran yang akhirnya membentuk tatanan sosial (Mosco, 2009: 206-209).

• **Framing dan Realitas Sosial**

Demokratisasi pers yang dilakukan sejak era pemerintahan Habibie membuat pers makin mengokohkan fungsinya sebagai pilar ke-4 demokrasi. Pada saat yang sama demokrasi di Indonesia berkembang pesat. Sejak tahun 2004

presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tentu saja rakyat berhak memilih wakilnya, baik wakil rakyat tingkat kabupaten/kota, propinsi, maupun tingkat pusat. Surat kabar juga ikut serta dalam proses demokrasi melalui liputan-liputannya terkait proses pelaksanaan pilkada dan pemilu dengan menyajikan berbagai kegiatan partai atau kandidat. Pemberitaan surat kabar tentang aktivitas politik ini berbeda antara media yang satu dengan yang media lain. Hal ini mengukuhkan teori yang menyebutkan bahwa media tidaklah netral. Media menyajikan *frame* sesuai dengan kepentingannya. LIPI pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Framing terhadap Political Talk di Media Massa pada Pemilihan Umum Legislatif 2009”.

Tahun 2009 merupakan tahun politik karena pada tahun ini digelar pesta demokrasi 5 tahunan. Peran media dalam komunikasi politik menjembatani kandidat dengan konstituen. Dalam proses komunikasi tersebut media memiliki agenda melalui pembentukan realitas yang dihadirkan media melalui *frame*. Aktor politik juga menyajikan *frame* untuk kepentingannya. Oleh karena itu, *frame* sering dituduh sebagai kampanye tersembunyi. Media melakukan *framing* sesuai dengan ideologi media. Proses *framing* dihadirkan melalui *gate keeping*. Proses *gate keeping* dilakukan dengan cara menyeleksi konten yang sesuai dengan *frame* yang dipilih media. Konten yang diperoleh redaksi baik berupa liputan atau opini yang tidak sesuai dengan *frame* akan dibuang ke tempat sampah. Penelitian ini melihat pemetaan *frame* yang ditawarkan partai politik maupun legislatif dan melihat peta hubungan *frame* antar media dengan kekuatan politik ekonomi.

Studi ini merupakan subdisiplin komunikasi politik. Dalam komunikasi politik media menampilkan realitas politik sesuai dengan *frame* yang dipilihnya. Mc Nair (2003: 12-13) menyebut bahwa realitas politik adalah:

- (a) Realitas politik objektif, yaitu peristiwa politik yang objektif atau apa adanya;
- (b) Realitas politik subjektif, yaitu peristiwa politik sebagaimana dirasakan aktor dan warga negara;
- (c) Realitas yang dikonstruksi, makna peristiwa sebagaimana yang diberitakan media.

Temuan penelitian ini menunjukkan media sangat berperan menghadirkan realitas politik melalui *frame* yang dipilihnya. Dari 6

surat kabar yang diteliti, yaitu *Media Indonesia*, *Waspada*, *Jawa Pos*, *Koran Tempo*, *Sindo*, dan *Kompas*, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang sama. Partai besar yaitu Demokrat, Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat porsi besar dalam pemberitaan. Kesamaan lain adalah skema berita banyak lebih menonjolkan figur (skema *person*) dibanding skema peristiwa: antartokoh politik saling melempar kritik, sedangkan program kerja partai kurang terekspos.

Dilihat dari isinya, surat kabar *Waspada* dan *Sindo* memberi *frame* positif pada Partai Demokrat. *Waspada* bahkan mempersonifikasikan dirinya sebagai bagian dari Partai Demokrat. *Sindo* mengambil *frame* Partai Demokrat merupakan partai yang pro-rakyat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini berbeda dengan *frame* yang diambil *Media Indonesia*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Surat kabar tersebut mengambil *frame* Partai Demokrat kurang positif. Pemberitaan mengenai Partai Demokrat lebih banyak seputar masalah pelanggaran yang dilakukan partai.

Media Indonesia mengambil *frame* positif untuk Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam sebuah pemberitaannya Media Indonesia menyebut: “Golkar sebagai partai politik yang kuat dan terbukti mampu mempertahankan eksistensinya”; “berjuang untuk kesejahteraan rakyat”; dan “menguatkan rasa kebangsaan”. Pilihan menampilkan *frame* positif untuk partai Golkar merupakan kebijakan redaksi. Tidak tertutup kemungkinan dalam pengambilan kebijakan redaksi terjadi intervensi dari pemilik modal. Hal ini disebabkan karena pemilik modal, yaitu Surya Paloh, merupakan fungsionaris Partai Golkar.

Waspada juga mengambil *frame* yang cukup baik terhadap Partai Golkar. Namun, dalam beberapa pemberitaan *Waspada* melontarkan sindiran terhadap Partai Golkar yang dibungkus dalam metafora bahasa. *Jawa Pos* juga mengambil *frame* positif terhadap Partai Golkar. Skema yang diambil adalah skema *person*. Jusuf Kalla (JK) merupakan tokoh yang digambarkan dekat dengan rakyat.

Frame yang diambil oleh 6 surat kabar yang diteliti semua memberikan penggambaran kurang positif kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, terdapat 2 surat kabar yang mengambil *frame* cukup baik

terhadap PDIP. Surat kabar tersebut adalah *Sindo* dan *Media Indonesia*. Skema yang diambil adalah skema tokoh. Disini Megawati digambarkan sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi *frame* media. Pertama, adalah ideologi pasar. Media yang mengambil *frame* sesuai dengan ideologi pasar dengan menyajikan apa yang diinginkan publik. Pada tahun 2009 Presiden Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan pendiri Partai Demokrat. Oleh karena itu, publik menginginkan pemberitaan yang baik terhadap partai yang dipimpin oleh penguasa. *Waspada* dan *Sindo* tampaknya juga mengambil ideologi pasar dalam kebijakan redaksionalnya. Kedua, adalah ideologi organisasi media yang terkait dengan kepemilikan. *Frame* seperti ini diambil oleh *Media Indonesia*. Sementara itu, *Jawa Pos* dan *Kompas* yang mengambil *frame* kurang positif terhadap Partai Demokrat tampaknya ingin mengambil pasar masyarakat yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu, 2 surat kabar tersebut memberi ruang pada pemberitaan-pemberitaan PDIP yang positif (Widyawati, 2009: 159-164).

• TIK dan Era Baru Demokrasi di Indonesia

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa iklim baru demokrasi di Indonesia. TIK menjanjikan adanya transparansi. Oleh karena itu, TIK banyak digunakan untuk keperluan pelayanan dan kepentingan politik. Rasa ingin tahu kegunaan TIK dalam untuk kepentingan politik membawa LIPI melakukan penelitian berjudul “*Cyber Demokrasi Perkembangan Kontemporer Demokrasi di Indonesia, Kasus Pemilu 2009*”. Penelitian tahun 2009 merupakan *preliminary study*. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan TIK untuk keperluan Pemilihan Umum 2009 mencakup:

(a) Menghubungkan antara partai/kandidat dengan konstituen. Pada pemilu 2009 hampir semua partai besar memiliki *website*. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya menggunakan *blog*. Partai Golkar memiliki *website* yang *link* dengan anggotanya. Sementara itu, Partai Demokrat memiliki *website* yang informasinya lebih banyak soal ketua partai dan tokoh partai lain. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki *website* yang *link* dengan ketua partai dan anggota

partai yang dikenal sebagai selebritis atau *vote gather* (Widyawati, 2009: 84);

- (b) Transparansi pelayanan. KPUD Propinsi Yogyakarta dan Jawa Barat menggunakan TIK untuk pelayanan. Pelayanan ini termasuk sosialisasi mengenai tata cara memilih, memperkenalkan calon legislatif, dialog interaktif, dan agenda pemilu (Widyawati, 2009: 32 dan 40-41);
- (c) Pengawasan. Panwaslu Yogyakarta menggunakan TIK untuk pengawasan. Salah satu di antaranya adalah melacak informasi tentang akurasi data calon legislatif. Sifat TIK yang interaktif memudahkan Panwaslu melakukan tugas pengawasan. Kadang masyarakat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif melalui *blog*. Adapula calon legislatif yang melakukan konsultasi apakah yang dilakukan merupakan pelanggaran. Banyak calon legislatif yang gamang apakah yang dilakukan merupakan pelanggaran yang sifatnya *white lies* (Widyawati, 2009: 32-35).

Tahun 2010 judul penelitian adalah “*Cyber Demokrasi Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan Presiden 2009*”. Penelitian ini ingin melihat wacana kekuasaan dalam berbagai situs politik terkait dengan Pemilihan Umum 2009. Demokrasi *cyber* memiliki sifat yang interaktif. Asumsinya, wacana yang disajikan lebih egaliter dibanding media konvensional. Oleh karena itu, judul penelitian menggunakan terminologi “wacana emansipatoris”. Media baru, yaitu media yang menggunakan internet, menyajikan elemen penting yaitu sarana berpartisipasi dalam mengekspresikan pemikiran politik. Media baru memunculkan komunitas baru yang disebut dengan *Netters*, yaitu komunitas yang mengembangkan sosial media sebagai tempat diskusi. Inilah era demokrasi *cyber* tempat para aktor politik dan konstituen saling mengekspresikan dirinya secara terbuka.

Hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa dengan adanya demokrasi *cyber*, sumber informasi semakin banyak. Partai, tokoh partai, dan masyarakat bisa melakukan produksi pesan melalui sosial media. Pada era ini, *platform* yang banyak digunakan adalah *facebook*. Konten yang digarap adalah ada pihak yang pro dengan kandidat presiden tertentu, tetapi ada juga yang kontra. Ekspresi *netters* dibagi dalam kelas, ras/etnisitas, dan gender. Dalam situs-situs yang dibuat masyarakat, reaksi terhadap Megawati paling dominan adalah isu gender dan politik

generasi. Isu tersebut banyak dibicarakan melalui situs 'Say No to Megawati'. Situs lain yang kontennya lebih banyak kotra adalah 'Say No to JK'. Wacana yang dikembangkan lebih banyak seputar etnisitas. Sementara itu, 'Say No to SBY' menyorot kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak disorot karena dianggap menyogok kelas akar rumput.

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Bandung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan menjamurnya situs yang mendeskreditkan kandidat, di antaranya adalah:

- (a) Merupakan resonansi kekecewaan terhadap kandidat;
- (b) Ekspresi ketakutan kandidat tersebut menang;
- (c) *Black campaign*.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah *digital immigrant* banyak yang mencurigai kejujuran ekspresi demokrasi melalui internet. Sementara itu, *digital native* mempercayai ekspresi politik melalaui dunia maya bersifat jujur. Identitas *netters* boleh tidak jujur tapi ekspresi politiknya bisa jujur.

Kini kampanye melalui internet mulai menjadi rujukan media lain. Agenda media mulai berubah dari media baru ke media lama, kemudian mempengaruhi agenda masyarakat. Dulu, media lama mempengaruhi agenda masyarakat. Kini, media baru memunculkan fenomena baru yang disebut sebagai *citizen journalism*. Gerakan *netters* dan *citizen journalism* memunculkan gerakan masyarakat madani di internet (Widyawati, 2010: 133 -140).

Penelitian tahun 2011 adalah "Cyber Demokrasi, Wacana Korupsi, Kasus Cicak dan Buaya". Aktivisme internet (atau aktivisme klik) dengan judul "Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Bibit-Chandra" atau dikenal Cicak versus Buaya merupakan penelitian tentang aktivisme di internet yang paling banyak menyita perhatian masyarakat. Aktivisme ini merupakan pembelaan terhadap dua pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, yang dikriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Cicak merupakan simbol dari KPK, sedangkan Buaya merupakan simbol dari Polri. Visualisasi ini pertama diucapkan oleh Susno Duaji. Cicak vs Buaya mengandung arti cicak yang kecil (simbol dari

KPK) melawan Buaya yang besar (simbol dari Polri).

Rasa simpati masyarakat terhadap KPK memunculkan gerakan *netters* yang mendukungnya melalui *facebook*. Muncullah Gerakan 1.000.000 *facebookers* dukung Bibit Chandra yang diinisiasi oleh seorang akademisi. Gerakan 1.000.000 *facebookers* dukung Bibit-Chandra mengekspresikan pandangan yang tidak diperhatikan di dunia politik nyata. Gerakan ini mematahkan kendala ruang karena inisiatornya tinggal di Sumatera. Gerakan ini mengusung isu ketidakadilan. Dalam perkembangannya, ekspresi di ruang maya berkembang ke ruang nyata yaitu adanya demonstrasi. Gerakan ini ternyata mampu menekan kekuasaan untuk melepas Bibit-Chandra dari tahanan. Aktivisme internet atau aktivisme klik merupakan bentuk politik baru ketika ekspresi ruang maya dilanjutkan ke ruang nyata menghasilkan keputusan politik. Gerakan 1.000.000 *facebookers* mendapat tandingan dari Gerakan 2.000.000 tanda tangan mendukung Susno Duaji. Dalam gerakan ini, Susno Duaji digambarkan sebagai pahlawan. Pengembangan wacana seperti ini disebut dengan *counter discourse*. Tetapi karena merupakan *buble issue* maka gerakan tersebut tidak mendapat respon masyarakat (Santoso, 2011: 135-147).

• TIK dan Pembangunan

Penggunaan media untuk pembangunan bukanlah hal yang baru. Pada era media lama televisi banyak digunakan untuk keperluan pembangunan. Penggunaan TIK untuk pembangunan mulai banyak dibicarakan karena merupakan salah satu bagian dari program *World Summit on the Information Society* (WSIS) yang telah disepakati pada pertemuan di Jenewa pada tahun 2003 dan di Tunisia tahun 2005. Indonesia menandatangani kesepakatan WSIS, konsekuensinya Indonesia harus mengaplikasikan kesepakatan tersebut. Salah satu kesepakatan WSIS adalah tahun 2015 sebanyak 50% penduduk dunia (termasuk penduduk Indonesia) terkoneksi internet. Pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa untuk mencapai sasaran *Milenium Development Goals* (MDG's) diharapkan TIK meningkatkan perannya untuk mengentaskan kemiskinan. Program tersebut diberi nama *Information and Communications Technologies (ICTs) for Poverty Reduction*. *United Nations Development Program* (UNDP) melihat adanya keterkaitan anatara berbagai indikator TIK

dengan pendapatan dan dengan indeks yang terkait dengan pengembangan SDM. Laporan UNCTAD menyebut bahwa TIK memiliki potensi mengurangi kemiskinan karena:

- (a) Memberikan akses informasi dan pengetahuan;
- (b) Akselerasi produktivitas, kesehatan dan pendidikan;
- (c) Akses menyampaikan pendapat.

Program TIK untuk pengentasan kemiskinan yang dicanangkan UNDP oleh Bappenas diterjemahkan dalam bentuk *telecenter*. Pemberdayaan masyarakat dalam *telecenter* diberikan oleh *info mobilizer* yaitu individu yang mengajarkan masyarakat tentang penggunaan internet. Penelitian tentang TIK untuk pembangunan dilakukan tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TIK menjembatani keterisolasian dari informasi global. Kasus di Jawa Timur seorang tokoh desa memberdayakan komunitasnya untuk keluar dari kemiskinan dengan menggunakan TIK yang diakses melalui *telecenter*. TIK mengatasi masalah eksklusi sosial. Melalui TIK posisi tawar komoditas di pasar pertanian menjadi lebih baik.

Telecenter memiliki fungsi pemberdayaan dan fungsi sosial. Akses informasi yang diberikan *telecenter* tujuannya adalah pengembangan UMKM dan pengembangan produk pertanian. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui potensi desanya, *telecenter* berperan membantu dengan memberi akses informasi. Pada saat penelitian dilakukan, penggunaan *e-commerce* belum berkembang. Beberapa UMKM berusaha memasarkan produknya melalui *e-commerce* tetapi kesiapan masyarakat dalam standarisasi produk dan kesiapan melakukan produksi dalam jumlah banyak masih kurang. Di sisi lain, *telecenter* harus mandiri secara ekonomi agar bisa menutup biaya operasional. *Telecenter* merupakan program pusat pemerintah, oleh karena itu pemerintah kabupaten kurang memberi dukungan sehingga pengurus harus berjuang mencari sponsor. Kemajuan *telecenter* tergantung visi pengelolanya (Santoso, 2009: 231-246).

• Masyarakat Jaringan

Runtuhnya Orde Baru memiliki makna bergesernya sistem pemerintahan yang sentralistis menuju sistem pemerintahan yang desentralistis. Peristiwa lain yang membuat pola komunikasi masyarakat berubah adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat.

Selain itu, teknologi telepon pintar telah mengakselerasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat jaringan. Melalui telepon pintar kini dunia ada dalam genggaman. Perubahan-perubahan ini mengubah pola komunikasi masyarakat terutama generasi muda lebih banyak mengkonsumsi pesan melalui media baru. Latar belakang tersebut menginspirasi LIPI untuk melakukan penelitian 5 tahun dengan judul “Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru”. Penelitian ini tiap tahun fokus kajiannya berbeda.

Penelitian Tahun 2015 berjudul “Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru: Studi Kasus Adopsi dan Pola Penggunaan Telepon Pintar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menunjukkan bahwa lingkungan sosial berperan dalam penggunaan telepon pintar. Responden yang merupakan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tidak terlalu memprioritaskan nilai guna teknologi. Dalam proses adopsi setiap generasi memiliki preferensi terhadap *platform* yang dipilih. Untuk *instant messaging* generasi *baby boomers* dan generasi X lebih menyukai *WhatsApp*, sementara generasi Y lebih menyukai *Line*. Pilihan sosial media generasi *baby boomers* dan generasi X adalah *Facebook*, sedangkan generasi Y lebih suka *platform* lain.

Penelitian Tahun 2016 berjudul “Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru: Media Baru dan Konstruksi Identitas”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial meningkatkan ikatan primordial. Sentimen primordial banyak digunakan untuk kegiatan revitalisasi budaya. Dalam beberapa kasus, sosial media digunakan untuk gerakan politik identitas.

Penelitian Tahun 2017 berjudul “Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru: Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru PascaOrde Baru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi dan sirkulasi budaya populer bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu pengguna sosial media. Kini individu tanpa didukung kapital besar bisa memproduksi budaya populer. Hal ini berbeda dengan era media lama ketika produksi budaya populer hanya bisa dilakukan oleh kapitalis media. Kemudahan proses produksi memunculkan adanya “budaya tandingan” atau *counter culture* terhadap budaya populer *mainstream*. Akan

tetapi, dalam hal produksi masal, kapitalis media masa lampau masih berpengaruh dalam produksi dan sirkulasi budaya populer.

Diskusi dan Simpulan

• Diskusi

Studi yang dilakukan oleh LIPI sejak tahun 1976 sampai 2017 berbicara tentang konteks sosial yang mempengaruhi kontrol terhadap media. Pada era Orde Baru, kontrol terhadap media baik cetak maupun televisi berada di tangan pemerintah. Adanya aturan mengenai pembredelan membuat pers Indonesia tidak bisa berfungsi sebagai kontrol sosial. Konten dari pers harus mencerminkan sikap pemerintah. Bagi pers yang berseberangan akan menerima pembredelan. Di sini pers digunakan untuk melanggengkan *status quo*.

Bagi media televisi atau media penyiaran, pada era Orde Baru kepemilikannya berada di bawah kontrol pemerintah. Pada awal sampai pertengahan pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia hanya memiliki satu buah stasiun televisi, yaitu Televisi Republik Indonesia. Pada tahun 1989 lahirlah televisi swasta pertama. Pemilik stasiun televisi swasta tidak lain adalah kroni dari pemerintah Orde Baru. Pemberitaan media penyiaran tidak berbeda dengan media cetak, yaitu dikontrol oleh pemerintah. Detik-detik terakhir menjelang kejatuhan Orde Baru, ketika demonstrasi besar-besaran meminta Soeharto mundur, barulah beberapa stasiun televisi berani menyiarkan berita yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Maraknya konten asing di televisi di era Orde Baru tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga terkait dengan politik media. Di jaman pemerintahan Orde Baru, Indonesia banyak mendapat bantuan luar negeri dari Negara-negara Barat. Sebagaimana dijelaskan di atas era kejayaannya, televisi merupakan ciri masyarakat modern atau masyarakat industri. Pada era ini produk industri berlimpah. Pemberi bantuan menginginkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi agar masyarakat membeli produk industri dari negara barat. Sebagaimana dinyatakan di atas, televisi adalah etalase gaya hidup, sedangkan gaya hidup terkait dengan konsumsi. Oleh karena itu, paket bantuan negara maju termasuk teknologi media beserta kontennya. Artinya, selain pemerintah

Orde Baru, kontrol media di Indonesia juga dilakukan dalam skala global.

Ketika Orde Baru runtuh, pers Indonesia menunjukkan keinginannya menjalankan fungsi sosial kontrol dengan cara menampilkan pemberitaan yang tidak selalu sejalan dengan pandangan pemerintah. Fungsi kontrol sosial ini di Indonesia menjadi tuntutan sejak pemerintahan Orde Baru yang memiliki ciri mirip dengan rezim otoritarian jatuh. Tuntutan menjalankan fungsi kontrol secara akademik berkembang pada tahun 1940-an. Tuntutan ini merupakan respon atas kontrol media oleh rezim otoritarian di Barat. Akademisi memberi nama *normative theory* atau *social responsibility theory*.

Alih-alih menjalankan fungsi tanggung jawab sosial, dalam menjalankan peran ini pers Indonesia mendapatkan tekanan dari penguasa kapital. Setelah Orde Baru runtuh, kapitalisasi dalam industri media cetak berkembang luar biasa, hasilnya adalah adanya konglomerasi media. Konglomerasi media cetak membuat pers berbicara atas nama pasar atau pemilik kapital. Studi “Pers Daerah Menyongsong Otonomi dan Desentralisasi” dan “Analisis *Framing* Terhadap *Political Talk* di Media Massa pada Pemilihan Umum Legislatif 2009” menguatkan proposisi tersebut. Kedua studi tersebut menunjukkan kaitan antara kepemilikan kapital dengan kontrol terhadap media. Hal ini sangat menarik untuk dipelajari. Adanya kontrol terhadap konten media oleh kapitalis menyiratkan bahwa tatanan sosial didekte kapitalis.

Di era teknologi Informasi dan komunikasi mulai berkembang, kekuasaan negara dan kapitalis media mulai berkurang. Terdapat kekuatan lain yang memiliki akses kontrol terhadap media, yaitu komunitas *netters*. Data empiris yang didapat dari penelitian “*Cyber Demokrasi*” dan “*Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru*” menunjukkan hal tersebut. Dalam kaus Gerakan 1.000.000 *Facebokers* Dukung Bibit-Chandra, kekuatan *netters* dalam mengontrol konten luar biasa. Hal ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah, yaitu melepaskan Bibit-Chandra.

Studi mengenai “*Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia PascaOrde Baru: Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru*” menunjukkan kecenderungan yang sama. Produksi dan konsumsi budaya baru kini bukan lagi ditentukan oleh kapitalis. Sosial media

memunculkan bentuk masyarakat baru yaitu masyarakat prosumer (produser dan konsumen). *Netters* bisa melakukan produksi konten maupun konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, *netters* bisa memberikan rekomendasi kepada komunitas jaringannya. Pada era ini, tumbuh bentuk-bentuk baru budaya populer di daerah sebagai budaya tandingan yang berbeda dengan budaya populer yang *mainstream*.

Pola perkembangan studi media di LIPI mirip dengan yang terjadi di Barat. Di Indonesia, studi media mulai berkembang di era Orde Baru yang sentralistis. Teori yang digunakan pada umumnya *media effect*. Studi kritis yang akarnya *neo-marxian* pada saat Orde Baru sulit dilakukan karena referensinya terbatas dan adanya kontrol yang ketat dari otoritas terhadap studi yang dianggap kekiri-kirian. Sebenarnya para akademisi dan aktivis sudah banyak yang secara sembunyi-sembunyi melakukan diskusi buku. Barulah pada saat Orde Baru runtuh kajian kritis sangat marak. Euforia tersebut mulai menurun seiring dengan kesadaran bahwa tidak semua permasalahan penelitian selalu cocok menggunakan paradigma kritis dan melemahnya studi kritis di Barat. Selain itu, pergeseran penggunaan dari media lama ke media baru mengubah tema-tema studi di berbagai belahan dunia, termasuk di LIPI. Perbedaannya, studi di LIPI lebih lambat 10-20 tahun dari perkembangan studi di Amerika dan Eropa. Keterlambatan ini terkait dengan konteks historis terjadinya fenomena sosial.

• **Simpulan**

Data empiris yang diperoleh selama penelitian dari tahun 1976 sampai 2017 menunjukkan bahwa konteks sosial politik berpengaruh terhadap tema studi dan penggunaan teori. Di Era Orde Baru, fungsi media adalah memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Fungsi sebagai pengawasan lingkungan kurang berkembang karena media berada di bawah kontrol pemerintah. Pandangan struktural fungsional melekat pada era tersebut. Tema-tema penelitian mengarah pada peran media sebagai alat pembangunan, di antaranya adalah Dampak SKSD Palapa dan pengaruh konten asing terhadap integrasi nasional. Persoalan-persoalan masyarakat akibat pengaruh media juga merupakan fokus studi, di antaranya adalah masalah gaya hidup, pornografi, dan kekerasan.

Perubahan rezim berpengaruh pada berubahnya konteks sosial politik yang pada

akhirnya berpengaruh pada perubahan fungsi media. Perubahan dari sistem pemerintahan sentralistis ke sistem pemerintahan yang demokratis membuat fungsi media berubah. Fungsi media sebagai kontrol sosial mulai berkembang. Kondisi ini berpengaruh pada tema studi. Berkembangnya media sebagai pilar ke-4 demokrasi menjadikan studi komunikasi politik sebagai isu yang menarik.

Selain itu, munculnya kekuatan baru yaitu kapitalis media dalam melakukan kontrol terhadap konten menjadi isu yang hangat. Fenomena tentang perkembangan industri media yang mengarah pada konglomerasi menjadi fokus kajian yang menarik. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa konglomerasi media menghambat fungsi media sebagai pilar ke-4 demokrasi karena adanya keseragaman konten. Temuan lain yang menunjukkan bahwa adanya kontrol terhadap konten oleh pemilik modal juga merupakan penghambat terwujudnya fungsi media sebagai kontrol sosial. Perubahan fungsi media juga berakibat pada pendekatan yang dipilih. Pada awal runtuhnya Orde Baru, studi yang dilakukan lebih banyak menggunakan paradigma konstruktivis dan kritis. Paradigma kritis mempercayai bahwa pengaruh media *powerful*. Cara berpikirnya adalah media berpengaruh secara makro terhadap budaya, kemudian budaya mempengaruhi individu. Cara berpikir seperti ini memang berbeda dengan *media effect* tempat media berpengaruh langsung pada individu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah pola komunikasi masyarakat dari *one to many* yang dihasilkan oleh media massa pada era masyarakat massa menjadi *one to one*, *one to many* dan *many to many*. Perkembangan TIK membuat isu yang berkembang bukan lagi pengetahuan dan informasi, tetapi aplikasi dari pengetahuan dan informasi ke peningkatan pengetahuan dan proses informasi. Disini *users* dan *doers* merupakan orang yang sama, jadi *users* bisa mengontrol teknologi (Castells, 2010:31). Fenomena ini bisa dilihat dari penelitian mengenai *cyber* demokrasi dan media baru serta perubahan masyarakat pasca Orde Baru.

Perubahan rezim mengubah pula pandangan tentang posisi *audience*. Perubahan pandangan bahwa media kuat dan *audience* lemah biasanya digunakan oleh pemerintah yang memiliki ciri-ciri mirip dengan sistem otoritarian.

Oleh karena itu, teori yang banyak digunakan pada studi di era Orde Baru berdasarkan asumsi media kuat *audience* lemah. Perspektif ini berubah ketika rezim berganti. Fungsi media sebagai kontrol sosial berdasarkan pada pandangan bahwa *audience* aktif. Perspektif tersebut berkembang luar biasa di era TIK yang ditandai oleh berkembangnya masyarakat jaringan. Kini *audience* tidak sekedar aktif bahkan mampu melakukan kontrol terhadap konten.

Daftar Pustaka

- Armando, Ade. (2011). *Televisi Jakarta Diatas Indonesia, Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Baran, Stanley dan Davis, Dennis K. (2000). *Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future*. Ontario: Wadsworth Thomson Learning.
- Castells, Manuel. (2010a). *The Rise of the Network Society Second Edition with a New Preface*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Hall, Stuart. (1993). Encoding, Decoding dalam During, Simon(ed) *The Cultural Studies Reader*. London: Routledge.
- Hanim, Masayu (ed). (2005). *Persepsi Masyarakat Terhadap Tayangan Pornografi, Kekerasan & Mistik di Televisi*. Jakarta: LIPI Press.
- Hanim, Masayu (ed). (2006). *Dampak Tayangan Pornografi, Kekerasan & Mistik di Televisi*. Jakarta: LIPI Press.
- Hanim, Masayu (ed). (2007). *Media Literacy Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Negatif Media Televisi*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Hidayat, Dedy N. (2000). Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru dalam Hidayat, Dedy N, Gazali, Effendi, Suwardi, Harsono, S.K. Ishadi (eds.) *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Dedy N. (2008). Perkembangan Ilmu dan Ilmuwan Komunikasi dalam *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mc Nair, Brian. (2003). *Introduction to Political Communication*. London: Routledge.
- Mosco, Vincent. (2009). *The Political Economy of Media*. London: Sage.
- Muchtar, Rusdi (Ed). (1995). *Dampak Media Transnasional Terhadap Masyarakat: Pengaruh Film Asing Televisi Terhadap Orang Muda*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Muchtar, Rusdi (ed).(1996). *Dampak Media Transnasional Terhadap Masyarakat di Indonesia: Pengaruh Film Asing di Televisi Terhadap Gaya Hidup di Medan, Surabaya dan Ujung Pandang*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Neuman, Lawrence W. (2006). *Social Research Methods. Quantitative Approaches*. Boston: Pearson International Edition.
- Rogers, Everett, M. (1994). *A History of Communication Study. A Biographical Approach*. New York: The Free Press.
- Santoso, Widjajanti, M.(ed). (2009). *Internet & Kemiskinan, Pergerakan Telecenter di Jawa*. Jakarta: LIPI Press.
- Santoso, Widjajanti, M.(ed). (2010). *Suara Kita, Internet Masuk Desa Tantangan & Harapan*. Jakarta: LIPI Press.
- Santoso, Widjajanti, M (ed). (2011). *Cyberdemokrasi, Wacana Korupsi: Kasus Cicak & Buaya*. Jakarta: LIPI Press.
- Smythe, Dallas. (1995). *On the Audience Commodity and Its Work* dalam Barret, Oliver Boyd and Newbold, Christ (eds) *Approaches to Media, A Reader*. London: Arnold.
- Widyawati, Nina (ed). (1997). *Dampak Media Transnasional Terhadap Masyarakat di Indonesia: Pengaruh Film Televisi Terhadap Integrasi Nasional*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Widyawati, Nina (ed). (1998). *Dampak Media Transnasional Terhadap Masyarakat di Indonesia: Pengaruh Film Asing Televisi Terhadap Kenakalan Remaja*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Widyawati, Nina (ed). (2000). *Pers Daerah Menyongsong Otonomi & Desentralisasi*. Jakarta: PMB-LIPI.

Widyawati, Nina (ed). (2009). *Analisis Framing Terhadap Political Talk di Media Massa pada Pemilihan Umum Legislatif 2009*. Jakarta: LIPI Press.

Widyawati, Nina (ed). (2009). *Cyberdemocracy Perkembangan Kontemporer Demokrasi*

di Indonesia, Kasus Pemilu 2009. Jakarta: LIPI.

Widyawati, Nina (ed). (2010). *Cyber Demokrasi, Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan Presiden 2009*. Jakarta: P2KK-LIPI.